



Pengantar Edisi Khusus 55 Tahun Pendidikan Planologi: Pembangunan Kota Inklusif di Era Desentralisasi

Elkana Catur Hardiansah¹

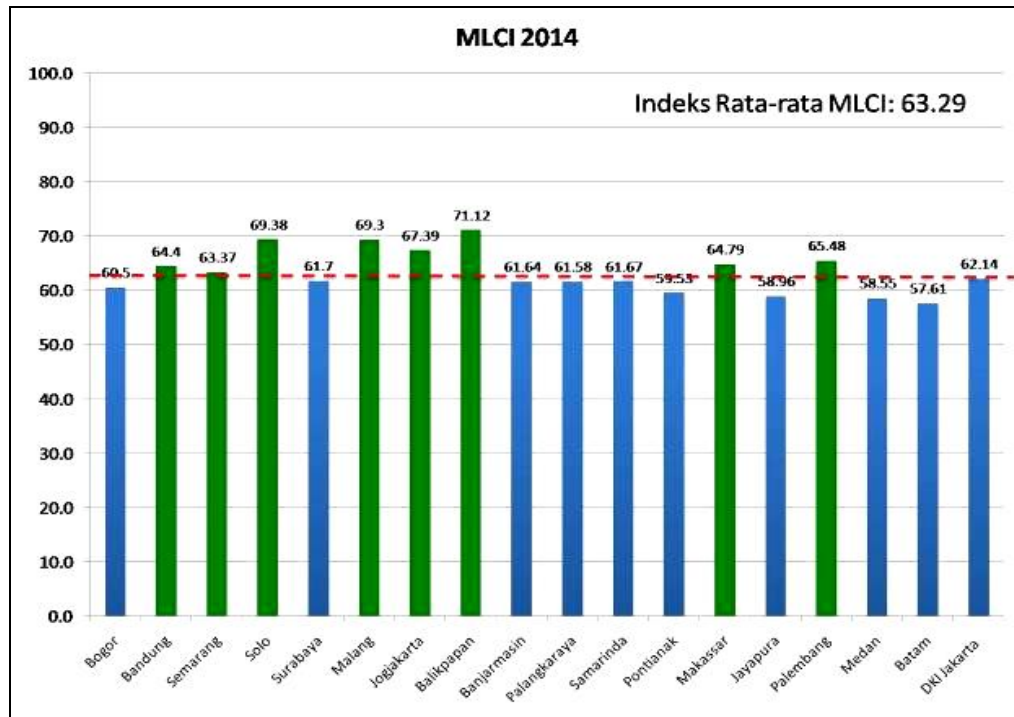
Dalam proses pergeseran global yang terjadi saat ini, Indonesia memegang peranan yang sangat strategis. Dengan jumlah penduduk dan potensi pasar yang besar, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi, Indonesia akan menjadi bagian dari kekuatan utama ekonomi Asia bersama dengan Cina dan India – sebelumnya Jepang dan Korea Selatan sejak 40 tahun yang lalu telah merubah peta ekonomi global. Terlebih dengan adanya *ASEAN Economic Community* sejak tahun 2015 dengan besar pasar mencapai 600 juta penduduk memberikan kesempatan bagi Indonesia bersama ASEAN menjadi pemimpin perubahan tingkat regional ataupun global.

Perkembangan yang cepat ini juga diikuti oleh kecenderungan perkembangan penduduk Indonesia yang mengarah kepada bonus demografi di tahun 2025. Kecenderungan yang lain adalah proses urbanisasi yang terjadi di Indonesia mengalami percepatan yang cukup fantastis. Proporsi penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan diperkirakan akan mencapai 67.5% pada tahun 2025. PDRB kawasan perkotaan diperkirakan akan mencapai 86% pada tahun 2030 (World Bank, 2012).

Kecepatan urbanisasi mengindikasikan bahwa ukuran kota akan semakin membesar, desa akan mengkota, kota kecil akan menjadi kota menengah, kota menengah akan menjadi kota besar dan kota besar akan menjadi megacity, kota-kota baru akan terbentuk, tersebar di seluruh nusantara. Pada proyeksi pertumbuhan PDRB kota yang dilakukan oleh McKinsey Global Institute (2012) disebutkan bahwa PDRB kota kecil dan kota menengah di Indonesia tahun 2010 – 2030 akan tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB Kota Jakarta. Seluruh potensi ini tentunya menjadi bekal positif dalam mengoptimalkan peran kota sebagai pusat pertumbuhan yang berkelanjutan. Melalui pengelolaan potensi yang baik maka Kota di Indonesia dapat menjalankan perannya secara maksimal sebagai pusat pertumbuhan dan pusat pengetahuan.

Kenyataannya kota-kota di Indonesia masih meretas jalan panjang menuju perwujudan kota yang layak huni dan berkelanjutan. Hasil survey Ikatan Ahli Perencanaan (2014) terhadap ke 18 kota yang dituangkan dalam *Most Livable City Index* menunjukkan bahwa terdapat 8 kota yang memiliki nilai indeks kelayakhunian kota di atas rata-rata nasional yaitu 62.39. Sementara 10 Kota lainnya masih mengalami persoalan-persoalan. Kota-kota tersebut adalah Balikpapan, Solo, Malang, Yogyakarta, Makassar, Palembang, Bandung dan Semarang. Empat dari delapan kota tersebut merupakan kota-kota menengah dengan penduduk kurang dari 1 juta jiwa.

¹ Wakil Sekretaris Jenderal 2 (Bidang *Urbanism and Livable City*), Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia, email: elkana.catur@gmail.com



Sumber: Ikatan Ahli Perencanaan (2014)

Pertumbuhan penduduk yang cepat disertai perkembangan fisik yang tidak terkendali menyebabkan beberapa kawasan perkotaan mengalami penurunan kualitas hidupnya. Beberapa aspek kehidupan kota-kota di Indonesia, menurut Ikatan Ahli Perencanaan (2014), yang masih dianggap dibawah standar oleh warga kota antara lain kriminalitas, ketersediaan fasilitas rekreasi, perlindungan terhadap bangunan bersejarah, lapangan kerja, biaya hidup, kemacetan, kualitas angkutan umum, RTH dan pencemaran. Temuan ini kemudian merefleksikan persoalan kota-kota metropolitan dan besar seperti kemacetan, kawasan kumuh, polusi udara dan buruknya infrastruktur perkotaan yang semuanya diakibatkan oleh ketidakmampuan kota dalam merespon aktivitas yang berkembang didalamnya. Kota di Indonesia harus dapat menyelesaikan persoalan-persoalannya sehingga menjadi wadah yang kondusif bagi kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh kelompok pekerja yang produktif dan kreatif.

Era desentralisasi dan demokratisasi yang terjadi sejak era reformasi memberikan pengalaman tersendiri dalam pendekatan pembangunan kota. Kewenangan yang luas tanpa disertai mantapnya kapasitas manajemen perkotaan menyebabkan banyak kota justru mengalami permasalahan lingkungan yang lebih kompleks. Pembangunan fisik yang tidak terkendali tanpa memperhatikan prinsip-prinsip lingkungan dan penataan ruang berujung pada penurunan kualitas kelayakhunian kota.

Di sisi lain, desentralisasi memberikan kesempatan munculnya pemimpin-pemimpin kota reformis yang berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan wilayah perkotaan dengan terobosan yang inovatif. Solo, Sawahlunto, Palembang, Kabupaten Bantaeng,

Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Wakatobi, Kota Surabaya dan banyak kota lainnya adalah sebagian dari kota yang menikmati buah manis desentralisasi.

Era demokratisasi menuntut para pemimpin kota untuk merubah paradigma pembangunan kotanya menjadi lebih inklusif. Kesadaran warga mengenai hak dan kewajibannya dalam proses pembangunan menuntut pemerintah kota untuk lebih akuntabel dalam menjalankan program-program pembangunannya. Pada banyak kasus kita telah melihat bagaimana pendekatan pembangunan kota yang inklusif membuat kota dapat mengatasi persoalan-persoalan keseharian kota seperti kawasan kumuh, kemacetan, lingkungan dan lain sebagainya

Kesadaran mengenai pentingnya pembangunan inklusif timbul setelah melihat realitas bahwa pembangunan yang telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi tidak selalu sepenuhnya dapat dinikmati oleh kelompok miskin di daerah kumuh perkotaan. Menurut Ranieri (2013), konsep pembangunan inklusif lahir dari komitmen untuk mendorong pertumbuhan dengan melibatkan warga sehingga dalam prosesnya terjadi penyebaran manfaat yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang lebih luas.

Pembangunan inklusif merupakan pendekatan yang diperkenalkan sebagai bentuk “reaksi” atas pembangunan yang menekankan kepada pertumbuhan dan meninggalkan kelompok marjinal. Pendekatan ini digaungkan sebagai upaya pemeratakan pembangunan tidak semata kepada kelompok-kelompok eksklusif semata. Terminologi pembangunan yang inklusif tidak terbatas kepada aspek ekonomi semata akan tetapi lebih luas memberikan akses kepada seluruh elemen masyarakat dalam menikmati hasil pembangunan, termasuk di dalamnya infrastruktur dan layanan dasar.

Dalam konteks pembangunan kota, menurut Belsky (2012) pemerintah harus lebih proaktif dibanding reaktif dalam mengatasi persoalan-persoalan kota seperti kawasan kumuh, kemacetan dan persoalan lingkungan, terutama yang terkait dengan kelompok miskin kota, kelompok berkebutuhan khusus, anak-anak, dan kelompok lainnya. Kelompok tersebut harus didudukkan sebagai elemen penting dalam kehidupan perekonomian kota sehingga kebijakan yang disusun akan mengarah kepada upaya memberikan kesempatan yang sama dalam beraktivitas sehingga meningkatkan dinamika kehidupan kota itu sendiri.

Membumikan Pembangunan Inklusif: Aksi dan Ide

Pada tahun 2012, beberapa alumnus Planologi ITB Angkatan 2000 dan anggota masyarakat lainnya bersepakat untuk mendirikan komunitas “Milemama”. Komunitas ini merupakan komunitas warga yang peduli terhadap pemenuhan hak-hak anak untuk memiliki ruang beraktivitas dan bermain yang layak. Kelahiran komunitas ini muncul dari keprihatinan makin maraknya budaya “*mall*” di kawasan perkotaan akibat ketiadaan ruang publik yang memadai diikuti budaya konsumerisme yang muncul akibat pertumbuhan ekonomi yang cepat.

Melalui serangkaian kegiatan sosial, komunitas ini berusaha membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya memberikan hak penggunaan ruang kota untuk seluruh kelompok masyarakat termasuk anak-anak. Komunitas ini berusaha menginspirasi masyarakat dan pengambil kebijakan untuk memberikan perhatian yang sama kepada anggota warga kota lainnya selain para investor dan penyandang modal lainnya.

Hal ini sejalan dengan pemikiran Sudaryono (2008) bahwa perencanaan kota perlu membangun cara kerja baru dalam menciptakan ruang kota yang berkeadilan dengan melakukan pemahaman awal mengenai pembangunan yang ada untuk merumuskan ruang kota yang mengarah kepada *appropriation* dan bukan *domination*. Pemikiran ini berasal dari pengamatan terhadap implementasi konsep Lefebvre dalam pembentukan ruang kota di Indonesia.

Keberadaan komunitas ini menginspirasi rekan-rekan Alumni Planologi ITB angkatan 2000 untuk turut serta berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan kota yang inklusif. Menyadari potensi yang besar dari alumni Planologi ITB Angkatan 2000 yang beraktivitas di berbagai bidang, maka kami mengundang beberapa individu untuk menyumbangkan buah pemikirannya dalam diskursus pembangunan kota yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Mewujudkan pembangunan yang inklusif tentunya tidak seindah jargonnya. Begitu banyak persoalan yang kemudian muncul pada pelaksanaannya. Permasalahan budaya, kelembagaan, pendanaan, SDM, tata pemerintahan dan lain sebagainya menjadi hambatan terwujudnya pembangunan yang inklusif. Untuk mewujudkan maka diperlukan solusi-solusi inovatif yang berasal dari prakarsa masyarakat ataupun datang dari kebijakan Pemerintah.

Sebuah Refleksi

Edisi khusus ini adalah percikan pemikiran para alumni Planologi Angkatan 2000 dari berbagai bidang minat dan pekerjaan untuk berkontribusi dalam rangka upaya mewujudkan pembangunan kota yang inklusif. Artikel-artikel pada edisi ini mencoba mengupas tantangan, metode dan gagasan yang secara langsung ataupun tidak langsung berhubungan dengan upaya mewujudkan pembangunan kota yang inklusif. Semua artikel tersebut merupakan penyempurnaan atas makalah-makalah terpilih yang pernah dipresentasikan pada *Seminar Nasional 55 Tahun Pendidikan Planologi: Peran dan Pendidikan Perencanaan Wilayah dan Kota di Era Desentralisasi dan Demokrasi* yang diselenggarakan pada tanggal 18 September 2014 di Bandung.

Artikel pertama yang ditulis secara bersama oleh Riela Provi Drianda, Isami Kinoshita dan Fani Deviana mengangkat kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Jepang untuk meningkatkan keamanan lingkungan supaya anak-anak bisa beraktivitas di luar rumah secara mandiri. Temuan penting yang perlu kita perhatikan adalah bentuk intervensi yang dilakukan untuk mencegah kejahatan terjadi melalui aksi komunitas, teknologi dan manajemen ruang. Artikel ini diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi para perencana kota dan pengambil kebijakan di Indonesia dalam menyelesaikan persoalan kejahatan terhadap anak yang saat ini kerap terjadi. Ruang-ruang kota seringkali belum memberikan kepentingan yang sama kepada kelompok anak untuk beraktivitas dengan lebih leluasa. Akhirnya anak-anak menjadi terbatas aktivitasnya didalam gedung pusat perbelanjaan dan ruang-ruang tertutup lainnya.

Artikel kedua yang ditulis oleh Adiwana F Aritenang mencoba mengamati dampak perekonomian global terhadap pertumbuhan ekonomi dalam sebuah sistem politik yang terdesentralisasi. Artikel ini memberikan gambaran bahwa peran pemerintah pusat yang dominan justru mengurangi dampak yang timbul dari pembangunan oleh pemerintah daerah sebagai aktor utama pembangunan. Artikel ini memberikan perspektif bagaimana dinamika

lingkungan regional dan global mempengaruhi pemerintah kota sebagai ujung tombak untuk mewujudkan pembangunan inklusif.

Artikel ketiga yang ditulis oleh Nurrohman Wijaya mengangkat praktik dari adaptasi kota-kota di Indonesia terhadap perubahan iklim dengan lokasi studi di Kota Semarang. Artikel ini mengkaji proses pembelajaran kota-kota Indonesia dalam merespon perubahan iklim, terutama berkaitan dengan pemberian ruang yang sama bagi seluruh kelompok masyarakat terutama yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Artikel ini menghadirkan isu kontemporer perubahan iklim sebagai salah satu tantangan yang dihadapi oleh para pemerintah kota di Indonesia. Tantangan ini nyata dan berpengaruh terhadap kebijakan yang membentuk ruang kota.

Artikel keempat yang ditulis oleh Harya Setyaka Dillon mengemukakan temuan mengenai penerapan biaya kemacetan pada kota yang berkarakter monosentrik. Artikel ini mengusulkan suatu model ekonometrik yang dapat memberikan kontribusi dalam penciptaan ruang kota yang berkelanjutan, efisien dan berkeadilan.

Artikel terakhir ditulis oleh Agung Wahyudi dan Yan Liu. Artikel ini memperkenalkan pemodelan berbasis *cellular automata* (CA) dan adaptasinya untuk keperluan aplikasi di bidang spasial perkotaan. Artikel ini juga akan menjelaskan konsep *agent-based model* (ABM) sebagai model yang memiliki kemampuan untuk merepresentasikan perilaku para pelaku pembangunan. Keberadaan model ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pengambil kebijakan dalam menyusun kebijakan pola dan struktur ruang yang berkeadilan dan berkelanjutan

Keragaman topik yang diangkat oleh para alumni Planologi 2000 dalam jurnal edisi kali ini merupakan langkah kecil dalam mengumpulkan potensi yang amat beragam. Hal yang amat sulit untuk melakukan pembahasan yang spesifik dari pembangunan kota yang inklusif, dikarenakan minat, latar belakang pendidikan lanjutan serta profesi yang berbeda. Tetapi kami mempunyai harapan besar agar para pembaca dapat tetap menaruh seluruh topik bahasan dalam satu kerangka besar mengupayakan pembangunan perkotaan yang inklusif.

Tentunya kehadiran artikel-artikel ini tidak dapat menjangkau seluruh aspek dalam mewujudkan pembangunan kota yang inklusif. Keterbatasan keahlian dan waktu menyebabkan tidak semua komunitas Planologi angkatan 2000 berkontribusi dalam jurnal ini. Kami berharap artikel-artikel yang disampaikan oleh rekan-rekan kami dapat menjadi pemancing bagi diskusi-diskusi lanjutan pada tema pembangunan yang inklusif.

Daftar Pustaka

- Belsky, Eric S. (2012) Planning for Inclusive and Sustainable Urban Development. Dalam Starke, Linda (eds) *State of the World 2012: Moving Toward Sustainable Prosperity* (hal. 38-52). Washington DC: Island Press/Center for Resource Economics.
- Ikatan Ahli Perencanaan (2014) *Indonesia Most Livable City Index*. Jakarta: Ikatan Ahli Perencanaan.
- McKinsey Global Institute. (2012) *The Archipelago Economy: Unleashing Indonesia's Potential*. Diperoleh dari http://www.mckinsey.com/insights/asia-pacific/the_archipelago_economy pada tanggal 20 September 2014.

- Ranieri, R., and Ramos, R.A. (2013) *Inclusive Growth: the Building up of a Concept*. IPC-IG Working Paper No. 104. Brasília; International Policy Centre for Inclusive Growth.
- Sudaryono. (2008) Perencanaan Kota Berbasis Kontradiksi; Relevansi Pemikiran Henri Lefebvre dalam Produksi Ruang Perkotaan Saat ini. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota* 19 (1) April 2008.
- World Bank. (2012) *Indonesia - The rise of metropolitan regions : towards inclusive and sustainable regional development*. Washington, DC: World Bank.